



**BUPATI TEMANGGUNG**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPADA DESA TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan pada kegiatan :
  - a. bidang pemerintahan desa;
  - b. bidang pembangunan desa; dan
  - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk:
  - a. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  - b. penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
  - c. pengelolaan BUM Desa;
  - d. pengelolaan arsip Desa; dan
  - e. pemasangan tugu/patok batas desa;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:
  - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
  - c. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa;
  - d. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;

- f. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
  - g. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan di wilayah Dusun;
  - h. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - i. pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
  - j. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah yang bukan milik pribadi, dan yayasan;
  - k. pembangunan dan pengelolaan makam Desa dan petilasan;
  - l. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - m. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - n. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - o. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
  - p. pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
  - q. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - r. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
  - s. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
  - t. pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
  - u. pengembangan ternak secara kolektif;
  - v. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - w. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
  - x. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
  - y. pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa;
  - z. pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
  - aa. pembangunan dan pengelolaan bank sampah; dan
  - bb. pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk:
- a. pengembangan seni budaya lokal; dan
  - b. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
    - 1) kelompok tani;
    - 2) kelompok seni budaya; dan
    - 3) kelompok masyarakat lain di Desa.
- (5) Tatacara penggunaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa termasuk besaran biaya operasional kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- (6) Pemerintah Desa wajib menyediakan swadaya secara gotong royong masyarakat.
- (7) Swadaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa dana, material, tenaga kerja, konsumsi dan sebagainya sesuai dengan kemampuan.
2. Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 17 - Maret - 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 17 - Maret - 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 31  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPADA DESA

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
(NON BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS)

KOP PEMERINTAH DESA

Temanggung, .....20....

Nomor :  
Sifat :  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan bantuan  
          keuangan khusus APBD  
          Kab. Temanggung Tahun  
          .....

Kepada:  
Yth. BUPATI TEMANGGUNG  
Cq. Kepala .....(diisi  
nama OPD )  
Kab. Temanggung

Di

TEMANGGUNG

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun..... , di ..... Dusun .....RT/RW..... Desa ..... Kecamatan ..... dalam rangka kegiatan pembangunan sarana infrastruktur berupa ..... sebesar Rp. .... (tulis besaran rupiah dengan huruf disini) dengan dukungan swadaya masyarakat senilai Rp. .... (tulis besaran rupiah dengan huruf disini)

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas berkenannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui  
KETUA BPD DESA .....

Hormat kami  
KEPALA DESA .....

(Nama Terang dan Stempel)

(Nama Terang dan Stempel)

CAMAT

.....  
(Nama Terang dan Stempel)



CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
(BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS)

**KOP PEMERINTAH DESA**

Temanggung, .....20....

Nomor :  
Sifat :  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan bantuan  
          keuangan khusus APBD  
          Kab. Temanggung Tahun  
          .....

Kepada:  
Yth. BUPATI TEMANGGUNG  
Cq. Kepala Bappeda Kab.  
      Temanggung  
Di  
TEMANGGUNG

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun..... , di ..... Dusun .....RT/RW..... Desa ..... Kecamatan ..... dalam rangka kegiatan pembangunan sarana infrastruktur berupa .....sebesar Rp. .... (tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**) dengan dukungan swadaya masyarakat senilai Rp. .... (tulis besaran rupiah dengan huruf **disini**)

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas berkenannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui  
KETUA BPD DESA .....

(Nama Terang dan Stempel)

Hormat kami  
KEPALA DESA .....

(Nama Terang dan Stempel)

CAMAT

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

## PROPOSAL KEGIATAN .....

- I. Nama Kegiatan  
..... Desa ..... Kecamatan .....
- II. Volume kegiatan  
Panjang : ..... m  
Lebar : .....m  
Tinggi : .....m
- III. Lokasi kegiatan  
RT ..... RW ..... Dusun ...../ Desa ..... Kecamatan  
.....
- IV. Latar Belakang  
**(CONTOH)** : Jalan Dusun .....RT/RW..... saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. Kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. Selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun ..... ke daerah sekitarnya .
- V. Maksud dan tujuan  
**(CONTOH)** : Maksud dari pembangunan jalan Dusun .....RT/RW..... adalah untuk memperbaiki jalan yang semula merupakan jalan tanah menjadi jalan rabat beton.  
Adapun tujuannya adalah :
  1. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga Dusun ..... dan sekitarnya;
  2. Menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman.
  3. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
- VI. Penerima manfaat  
**(CONTOH)** : Penerima manfaat dari kegiatan pembangunan jalan Dusun ..... RT/RW.....adalah masyarakat Dusun ..... dan masyarakat Desa ....., serta masyarakat disekitarnya .
- VII. Hasil yang diharapkan  
**(CONTOH)** : Terwujudnya jalan yang layak, baik bagi pejalan kaki maupun pengendara, sehingga mampu memperlancar arus distribusi hasil bumi di tingkat lokal maupun sebaliknya, sehingga berakses bagi peningkatan ekonomi masyarakat Dusun .....RT/RW..... dan sekitarnya .
- VIII. Pelaksana kegiatan  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa .....
- IX. Jadwal pelaksanaan  
Kegiatan pembangunan jalan Dusun ..... dilaksanakan pada bulan ..... sampai dengan ..... 20.....(Time scedule terlampir).
- X. Jumlah anggaran  
Jumlah anggaran sebesar Rp. ....,- yang terdiri dari :
  1. Bantuan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp. ....,-; (RAB dan foto lokasi kegiatan 0% terlampir).
  2. Swadaya masyarakat sebesar : Rp. ....,-.



## XI. Penutup

**(CONTOH)** : Rencana pembangunan jalan Dusun  
.....RT/RW..... Desa .....Kecamatan.....,  
merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan mengingat sarana  
tersebut sudah tidak layak digunakan. Kegiatan pembangunan ini sudah  
tentu mempunyai manfaat positif, khususnya bagi masyarakat sekitar dan  
semua masyarakat pada umumnya.

Keberhasilan kegiatan ini tergantung kepada kesadaran, keseriusan,  
serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak. Untuk itu hanya  
kerja keras dan pengorbanan yang setulusnyalah yang sangat diharapkan  
demi terlaksananya kegiatan ini.

Kami sangat berharap permohonan ini dapat dikabulkan. Mudah-  
mudahan Allah swt. Selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada  
kita semua. Amiin .....).

Mengetahui  
KETUA BPD DESA.....

Hormat kami  
KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

(Nama terang dan stempel)

## XII. Lampiran

1. Denah Lokasi
2. Gambar
3. Foto 0%
4. Rencana Anggaran Kegiatan (RAB)
5. SK Kepala Desa tentang penunjukan keanggotaan TPK.
6. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

### **Catatan :**

Proposal dibuat rangkap 8 (delapan), Tanda tangan dan stempel basah dikirim  
kepada :

1. BPPKAD rangkap 3;
2. Bappeda rangkap 1;
3. Dinpermades rangkap 1;
4. OPD terkait rangkap 1;
5. Kecamatan 1;
6. Desa rangkap 1.

## PROPOSAL KEGIATAN .....

I. Nama Kegiatan  
Bantuan pengadaan sarana ..... Dusun .....RT/RW/ (**Nama Kelompok**) ..... Desa ..... Kecamatan .....

II. Volume kegiatan  
( **Dirincikan penggunaan dana bantuan untuk pengadaan .....** )

III. Lokasi kegiatan  
RT ..... RW ..... (**Nama Kelompok**) ..... Dusun .....  
Desa ..... Kecamatan .....

IV. Latar Belakang  
( **CONTOH** ) : Dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat di Desa ..... Kecamatan ..... dikembangkan berbagai subsektor diantaranya pertanian tanaman pangan sebagai alternatif upaya pemecahan masalah ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tani.  
Kelompok tani Harapan Desa Bengkal memiliki potensi wilayah sudah berupaya untuk menerapkan sistem pertanian organik. Dengan demikian kami mengambil langkah untuk mengajukan proposal ini berupa peralatan mesin ayakan beras.

V. Maksud dan tujuan  
( **CONTOH** ) : Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan dan memajukan petani dalam kelompok tani Harapan melalui pemanfaatan teknologi.

Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk mempermudah kelompok tani dalam kegiatan usaha taninya khususnya masalah menyortir beras kepala, beras pecah dan menir di kelompok tani Harapan;
2. Meningkatkan kualitas beras yang akan dipasarkan;
3. Menghemat biaya pengeluaran dan tenaga kerja.

VI. Penerima manfaat  
( **CONTOH** ) : anggota kelompok tani Harapan Desa ..... Kecamatan .....

VII. Hasil yang diharapkan  
( **CONTOH** ) : terwujudnya kelompok tani Harapan yang maju dan mandiri serta terciptanya kesejahteraan semua anggota.

VIII. Pelaksana kegiatan  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa .....

IX. Jadwal pelaksanaan  
Kegiatan bantuan ..... dilaksanakan pada bulan ..... 20.....

X. Jumlah anggaran  
Jumlah anggaran sebesar Rp. ....,-

XI. Penutup  
( **CONTOH** ) : Kelompok tani Harapan Desa ..... Kecamatan ..... merupakan salah satu kelompok yang ikut berperan dalam pembangunan desa khususnya di bidang pertanian. Melalui kelompok ini diharapkan akan mampu menyokong kemajuan perekonomian Desa.

Keberhasilan kegiatan ini tergantung kepada kesadaran,



keseriusan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak. Untuk itu hanya kerja keras dan pengorbanan yang setulusnyalah yang sangat diharapkan demi terlaksananya kegiatan ini.

Kami sangat berharap permohonan ini dapat dikabulkan. Mudah-mudahan Allah swt. Selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin .....

Mengetahui  
KETUA BPD DESA.....

Hormat kami  
KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

(Nama terang dan stempel)

## XII. Lampiran

1. Rencana Anggaran Kegiatan (RAB)
2. SK Kepala Desa tentang kepengurusan organisasi/kelompok.
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

### **Catatan :**

Proposal dibuat rangkap 8 (delapan), Tanda tangan dan stempel basah dikirim kepada :

1. BPPKAD rangkap 3;
2. Bappeda rangkap 1;
3. Dinpermades rangkap 1;
4. OPD terkait rangkap 1;
5. Kecamatan 1;
6. Desa rangkap 1.

**CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**  
**(INFRASTRUKTUR)**

KEGIATAN :  
 LOKASI :  
 VOLUME :  
 DESA :  
 KECAMATAN :  
 TAHUN :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME (M3)	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SUB TOTAL (Rp)
1						
2						
3						
dst						
<b>JUMLAH</b>						
Terbilang :						

Temanggung, ..... 20....

Mengetahui

KEPALA DESA .....

KETUA TPK DESA .....

(Nama Terang dan stempel)

(Nama Terang)



**CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
(NON INFRASTRUKTUR)**

KEGIATAN :  
 LOKASI :  
 VOLUME :  
 DESA :  
 KECAMATAN :  
 TAHUN :

NO	URAIAN KEGIATAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH SUB TOTAL (Rp)
1						
2						
3						
dst						
<b>JUMLAH</b>						
Terbilang :						

Temanggung, ..... 20....

Mengetahui

Hormat kami

KEPALA DESA .....

KETUA TPK DESA .....

(Nama Terang dan stempel)

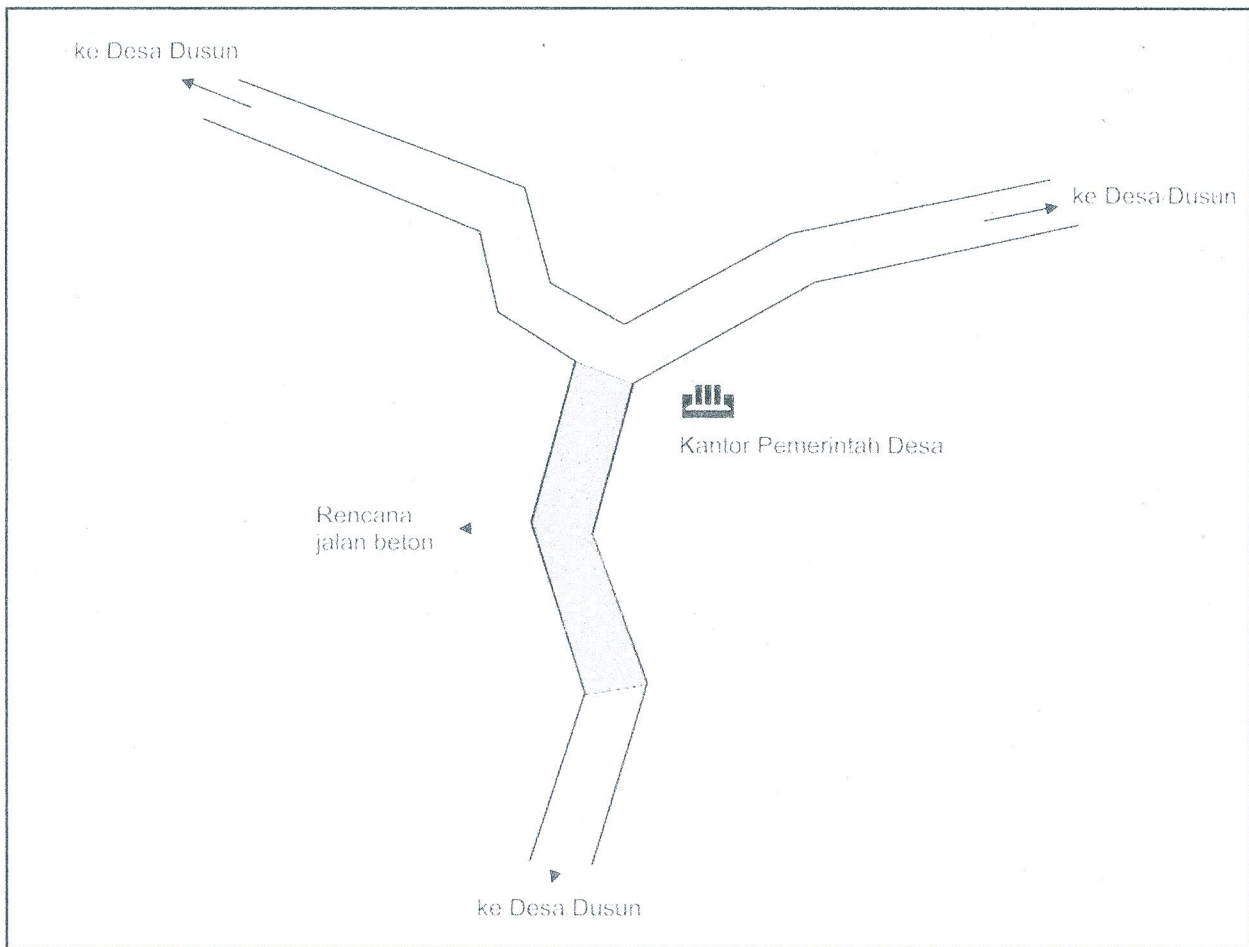
(Nama Terang)





## CONTOH DENAH LOKASI (INFRASTRUKTUR)

Kegiatan :  
Pekerjaan :  
Lokasi : Desa..... Kecamatan .....  
Tahun :



Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa .....

Temanggung, .....(tanggal)  
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

( ..... )

( ..... )

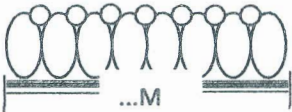
Mengetahui  
UPTD DPUPKP  
Kecamatan .....  
Kabupaten Temanggung

( ..... )

**CONTOH FORMAT GAMBAR INFRASTRUKTUR**

**GAMBAR**

Tlasah Jalan



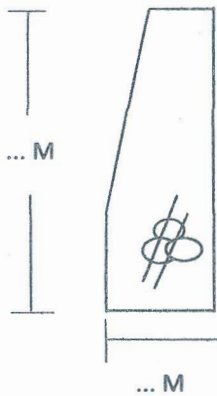
Panjang = .... m<sup>1</sup>

Jalan Beton



Panjang = .... m<sup>1</sup>

Talud



Talud Jalan = ... m<sup>1</sup>

Kegiatan : .....

Lokasi : Desa .....

Tahun : .....

Dibuat  
Ketua TPK

( ..... )

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa

( ..... )

Mengetahui

UPTD DPUPKP .....  
KAB. TEMANGGUNG

( ..... )



**CONTOH DOKUMENTASI AWAL PEKERJAAN/KEGIATAN**

**TAHUN 20....**

<b>DESA :</b>	<b>JENIS KEGIATAN :</b>
<b>KEC. :</b>	<b>VOLUME :</b>



--

--

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa .....

Temanggung, .....(tanggal)  
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

( ..... )

( ..... )

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN 20.....  
KEPALA DESA .....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 20.... tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20.... tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20 ....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



10. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ;
11. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Desa ..... Nomor 12 Tahun 20... tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa ..... Kecamatan .....
13. Peraturan Desa ..... Nomor 2 Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
  2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa (bila diperlukan);
  3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana/ sketsa bila diperlukan;
  4. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
  5. Membuat Rancangan Surat Perjanjian;
  6. Menandatangani Surat Perjanjian;
  7. Melaksanakan pekerjaan barang/ jasa secara swakelola;
  8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa; dan
  9. Melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaannya Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: .....

pada tanggal: .....

KEPALA DESA .....

(Nama terang)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Temanggung ( sebagai laporan ) ;
2. Bapak Camat .....

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
(NON INFRASTRUKTUR)

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

Temanggung, .....20....

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. BUPATI TEMANGGUNG  
Cq. Kepala BPPKAD  
Kabupaten Temanggung  
Lamp : Kabupaten Temanggung  
Perihal : Permohonan pencairan Dana di  
Bantuan keuangan Khusus Temanggung  
Tahun .....

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor .... tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus di APBD Kabupaten Temanggung Tahun ....., bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa ..... Kecamatan ....., sebesar Rp. .... (total besaran keseluruhan ditulis dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Proposal;
2. Foto copy rekening Bank Pemerintah Desa;
3. Pakta Integritas;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana bantuan;
5. Kwitansi.
6. SK Kepala Desa tentang susunan organisasi/kelompok.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa (APBDes)

Demikian atas realisasinya disampaikan terima kasih.

Mengetahui  
CAMAT .....

Hormat kami  
KEPALA DESA .....

(Nama Terang dan Stempel)

(Nama Terang dan Stempel)

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus APBD Kabupaten Temanggung Tahun ....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan keuangan khusus sesuai dengan usulan proposal, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temanggung, .....

KEPALA DESA .....

MATERAI

Rp 6.000,00

(Nama Terang dan Stempel)



CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

**KOP PEMERINTAH DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kegiatan ..... sudah masuk dalam APB Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Temanggung dengan sumber dana Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa Tahun 20.... sebesar Rp. .... (..... rupiah) dengan Kode Rekening (APBDes)....., kami sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang tertuang dalam proposal;
2. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
3. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
4. Membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Bupati cq. (OPD terkait) Kabupaten Tekmanggung dengan tembusan Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 1 (satu) bulan sejak bantuan diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Temanggung, .....20....  
KEPALA DESA

Materai  
6000 Cap.

.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus APBD Kabupaten Temanggung Tahun ..... telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan khusus dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, ..... 20 ...

KEPALA DESA

MATERAI

Rp 6.000,00

(Nama Terang dan Stempel)

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MENYEDIAKAN SWADAYA MASYARAKAT SECARA GOTONG ROYONG  
(KHUSUS PEKERJAAN INFRASTRUKTUR)

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MENYEDIAKAN SWADAYA MASYARAKAT SECARA GOTONG ROYONG

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus APBD Kabupaten Temanggung Tahun ....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

Bersedia untuk menyediakan swadaya masyarakat secara gotong royong dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang : Rp.
- b. Material : (disebutkan jenis dan dinominalkan uang)
- c. Tenaga kerja : (dihitung HOK dan dinominalkan uang)
- d. Konsumsi : (disebutkan jenis dan dinominalkan uang)
- e. Lain-lain : (disebutkan misalkan tanah/pohon dan lain-lain dinominalkan uang)

Temanggung, .....

KEPALA DESA .....

MATERAI

Rp

6.000,00

(Nama Terang dan Stempel)



CONTOH KWITANSI

NOMOR :

KUITANSI

Telah diterima : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kab. Temanggung  
Sebesar : .....juta rupiah (dengan huruf)  
Untuk pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada  
Pemerintah Desa ..... Dari APBD Kabupaten  
Temanggung untuk kegiatan ..... lokasi  
..... Tahun 20....  
Terbilang : Rp .....,-

Temanggung,..... 20....

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

Materai 6000

\_\_\_TTD di atas materai\_\_\_      \_\_\_TTD\_\_\_

(Nama Terang)

(Nama Terang+Stempel Basah)

**CONTOH FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHAP I  
TAHUN 20....**

DESA : KEC. :	JENIS KEGIATAN : VOLUME :
FOTO 0% asli berwarna	
FOTO 0% asli berwarna	

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa .....

Temanggung, .....(tanggal)  
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

( ..... )

( ..... )

**PERMOHONAN PENCAIRAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 20....  
TAHAP II (40%)**



Kegiatan ..... Lokasi .....

Desa.....

Kecamatan .....

Kabupaten Temanggung



CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
TAHAP II (UNTUK INFRASTRUKTUR)

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

Temanggung, .....20....

Nomor :  
Sifat :  
Lamp :  
Perihal : Permohonan pencairan Dana  
Bantuan keuangan Khusus  
Tahun .....

Kepada  
Yth. BUPATI TEMANGGUNG  
Cq: Kepala BPPKAD  
Kabupaten Temanggung  
di  
Temanggung

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor .... tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun ....., bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa ..... Kecamatan ....., sebesar RP. .... (total besaran keseluruhan ditulis dengan huruf).

Selanjutnya kami mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Tahap II sebesar 40% Rp. .... (ditulis dengan angka) untuk dikirim melalui rekening Pemerintah Desa ..... Nomor ..... atas nama Bendahara Desa .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Foto copy rekening Bank Pemerintah Desa;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana bantuan;
4. Kwitansi.
5. Laporan penggunaan dana 60%
6. Foto 0% dan foto 50%.

Demikian atas realisasinya disampaikan terima kasih.

Mengetahui  
CAMAT .....

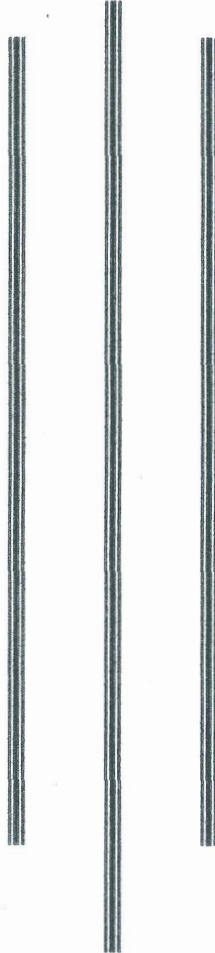
Hormat kami  
KEPALA DESA .....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

(Nama Terang dan Stempel)



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 20....  
KEGIATAN.....  
LOKASI.....**



Desa.....  
Kecamatan .....  
Kabupaten Temanggung



# KOP PEMERINTAH DESA

## SISTEMATIKA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Temanggung, .....20....

Nomor :  
Sifat :  
Lamp :  
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban  
Bantuan keuangan Khusus  
Tahun .....

Kepada  
Yth. BUPATI TEMANGGUNG  
Cq. Kepala Dinpermades  
Kabupaten Temanggung  
di  
Temanggung

Dengan ini kami sampaikan hasil Laporan pertanggungjawaban kegiatan/penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan (**ukuran/volume**)/ penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima.

B. Maksud dan Tujuan

Berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus.

C. Realisasi penggunaan dana

Berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.

D. Penutup

Berisi uraian tentang hal- hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.

Temanggung, .....,.....20...

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa.....

Kepala Desa .....

(.....)

(.....)

Camat

(.....)

# KOP PEMERINTAH DESA

---

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : Kepala Desa
3. Alamat : .....
4. Nomor HP. : .....

Menyatakan bahwa Tanah yang akan dibangun betul – betul Tanah milik RT/Dusun/Desa setempat bukan milik perseorangan/ milik pribadi, dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk Kegiatan Belanja Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Temanggung Tahun 20....sebesar Rp. ....,- (.....), Saya sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan Dana tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami ajukan melalui BPPKAD Kabupaten Temanggung .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa unsur paksaan dari siapapun dan penuh rasa tanggung jawab, apabila Saya melanggar dari Surat Pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Temanggung, ..... 20....

KEPALA DESA

*Cap kades*

*Materai 6000*

(.....)

# CONTOH BUKU KAS UMUM

Bantuan Keuangan Khusus

Kegiatan ..... Lokasi .....

Desa.....Kecamatan.....

Kabupaten Temanggung Tahun 20....

Pekerjaan :

Lokasi :

No	Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	<i>(urut sesuai tanggal nota belanja)</i>				
<b>TOTAL</b>					

Temanggung, ..... 20.....

Mengetahui/Menyetujui  
KEPALA DESA

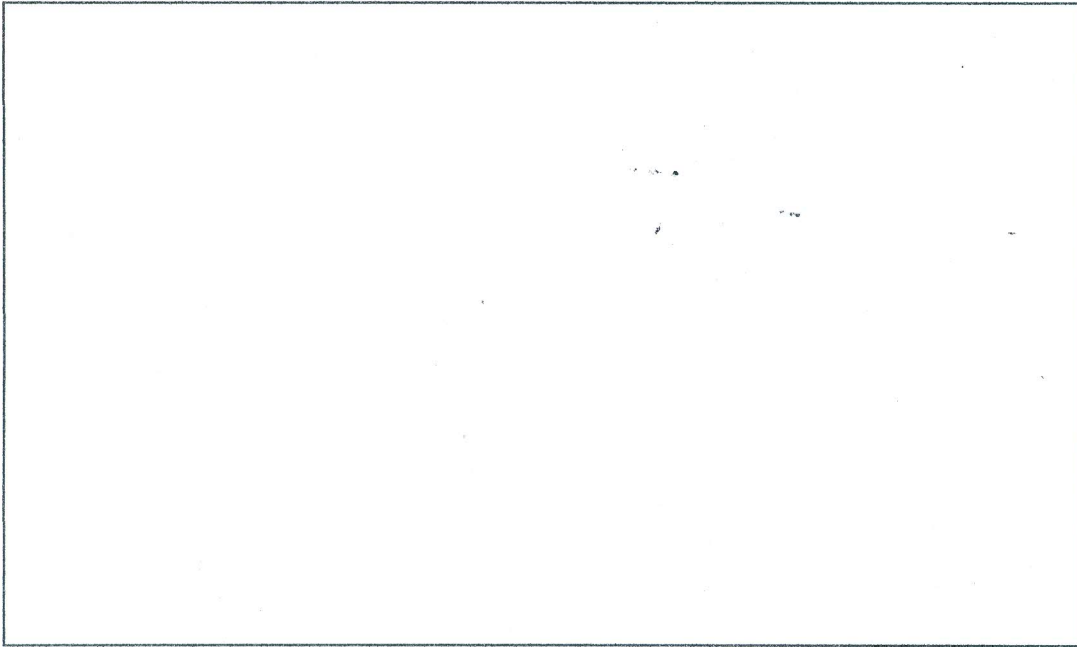
Bendahara

(.....)

(.....)



**NOTA**  
**(bukti pengeluaran yang sah)**



**\*( di urutkan berdasarkan tanggal sesuai BKU)**

**DOKUMENTASI  
TAHUN 20.....**

<b>DESA :</b>	<b>JENIS KEGIATAN :</b>
<b>KEC. :</b>	<b>VOLUME :</b>

FOTO 0% asli berwarna

FOTO 50% asli berwarna

FOTO 100% asli berwarna

## KOP OPD

Temanggung, .....20....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Bantuan Keuangan Khusus APBD Kab. Temanggung Tahun 20...

K e p a d a :  
Yth. BUPATI TEMANGGUNG  
Cq. Kepala BPPKAD  
Kab. Temanggung  
di  
Temanggung

Berdasarkan Surat permohonan dari Desa.... Tanggal ..... Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kegiatan ....., telah diadakan Verifikasi kelayakan oleh Tim yang ditetapkan Bupati mengenai :

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Kelengkapan Surat Permohonan  | Ada/ Tidak |
| 2. Maksud dan Tujuan             | Ada/ Tidak |
| 3. Rencana Anggaran Biaya ( RAB) | Ada/ Tidak |
| 4. Lampiran- lampiran            | Ada/ Tidak |
| 5. Survey Lapangan               | Ada/ Tidak |
| 6. Pos Dana yang dipergunakan    | Ada/ Tidak |

Sebagaimana hasil verifikasi tersebut maka agar dapat / tidak dapat dicairkan kepada :

1. Desa/Kecamatan :
2. Sebesar :
3. Melalui kegiatan :
4. Nama Bank :
5. Nomor Rekening :

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA OPD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

(Nama terang dan stempel)



CONTOH REKOMENDASI POD KEPADA TAPD  
KOP OPD

Temanggung, .....20..

Nomor :  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Lembar.  
Perihal : Rekomendasi Bantuan Keuangan Khusus APBD Kab. Temanggung Tahun 20...

K e p a d a :  
Yth. BUPATI TEMANGGUNG  
Cq. TAPD Kab. Temanggung  
di  
Temanggung

Berdasarkan proposal ajuan Dana Bantuan keuangan khusus dari :

Desa :  
Tanggal :  
Peruntukan :  
Jumlah Ajuan : Rp

Telah kami adakan verifikasi atas proposal tersebut pada tanggal .....

Dengan hasil sebagai berikut :

1.	Proposal	Lengkap	Tidak
2.	Rincian Penggunaan Dana	Lengkap	Tidak
3.	Data pendukung lainnya	Lengkap	Tidak

Dengan kesimpulan layak/ tidak layak untuk diberikan bantuan keuangan khusus.

Demikian untuk menjadikan pertimbangan dan proses lebih lanjut.

KEPALA OPD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

(Nama terang dan stempel)